

DRAFT TESIS

EKSEKUSI PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM

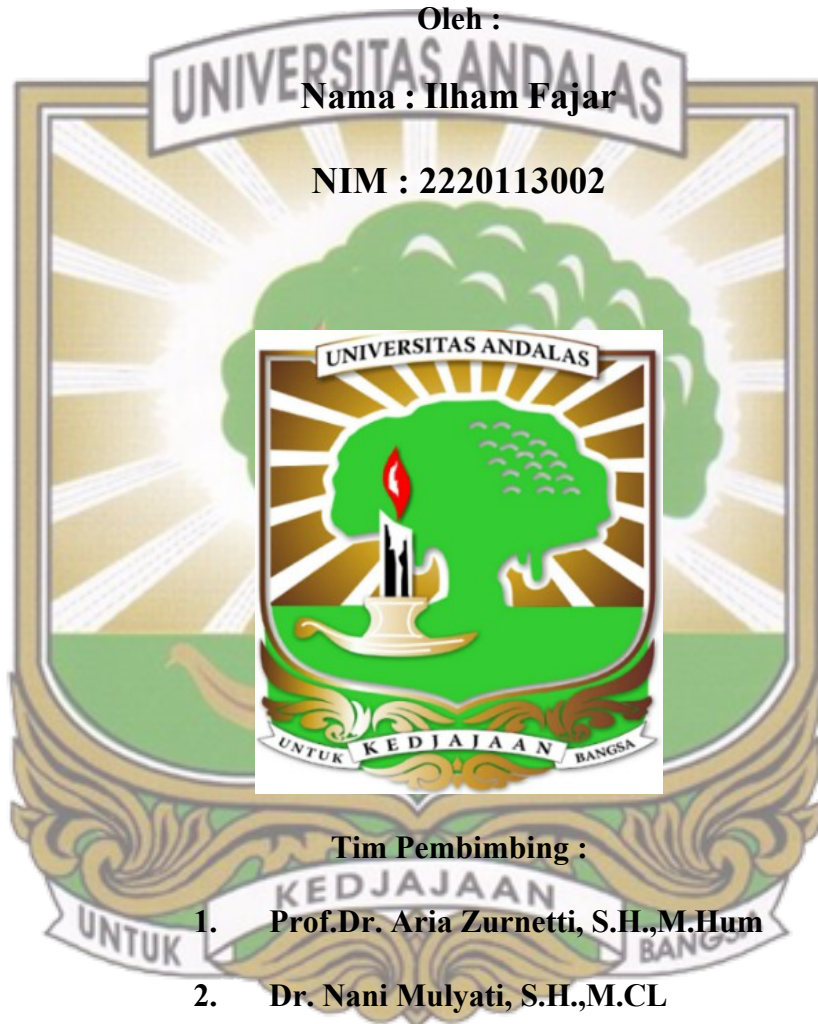
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM

KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT

Oleh :

Nama : Ilham Fajar

NIM : 2220113002



Tim Pembimbing :

1. Prof.Dr. Aria Zurnetti, S.H.,M.Hum
2. Dr. Nani Mulyati, S.H.,M.CL

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

HALAMAN PENGESAHAN
VALIDITY SHEET

No.Reg: 22/MH/I/2025

EKSEKUSI PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT

EXECUTION OF CRIMINAL PAYMENT OF RESTITUTION IN CORRUPTION CASE IN THE
JURISDICTION OF THE WEST PASAMAN DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE

Disusun Oleh:

Author:

Ilham Fajar
2220113002

Program Studi : Magister Hukum
Study Program : Master of Law

Tesis ini telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 4 Juli 2025 dan dinyatakan lulus oleh tim penguji yang terdiri dari:

This thesis has been defended in a comprehensive examination session on July 4th, 2025 and declared passed by the examining team consisting Of:

Pembimbing I
Supervisor I

Prof.Dr. Aria Zurnetti., S.H., M.Hum.
NIP. 196212311989011002

Penguji I
Examiner I

Prof. Dr. Ismansyah., S.H., M.H.
NIP. 195910101987021002

Penguji III
Examiner III

Dr. Lucky Raspati., S.H., M.H..
NIP. 197905182005011003

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas
Dean of Faculty of Law Andalas
University

Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP. 196807231993021001

Pembimbing II
Supervisor II

Dr. Nani Mulyati., S.H., M.CL.
NIP. 198208092005012002

Penguji II
Examiner II

Dr. Yoseryan., S.H., M.H., LL.M.
NIP. 196212311989011002

Ketua Program
Magister Hukum
Program Leader
Magistry of Law

Dr. Yasniwati, S.H., M.H.
NIP. 197211132005012001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ilham Fajar

NIM : 2220113002

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis dengan judul **“Eksekusi Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat”** adalah merupakan hasil karya saya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi/ Lembaga Pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebut sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Padang, Mei 2025
Yang menyatakan

Ilham Fajar

EKSEKUSI PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT

(Ilham Fajar, 2220113002, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas,

114 halaman, 2025)

ABSTRAK

Eksekusi pidana pembayaran uang pengganti merupakan instrumen strategis dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Tujuan utama dari pidana ini adalah memastikan bahwa pelaku korupsi tidak memperoleh keuntungan dari perbuatannya dan bahwa negara mendapatkan penggantian atas kerugian yang timbul. Meskipun kerangka hukum yang mengatur mekanisme ini telah tersedia secara normatif, eksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat masih menghadapi sejumlah tantangan substantif dan administratif yang berdampak pada efektivitasnya. Untuk mempelajari lebih lanjut permasalahan dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimanakah eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat? 2) Apakah kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dalam eksekusi pidana pembayaran uang pengganti pada perkara tindak pidana korupsi? 3) Bagaimanakah upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat agar pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dapat di eksekusi? Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis yang bersifat deskriptif dengan metode analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi pidana pembayaran uang pengganti secara umum telah dilaksanakan tetapi belum optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan kemampuan ekonomi terpidana, ketiadaan aset yang dapat dieksekusi, serta lambannya penyesuaian terhadap status barang rampasan setelah kewajiban pembayaran uang pengganti dipenuhi. Permasalahan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara amar putusan dan implementasi eksekusi berdasarkan kondisi konkret di lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut, kejaksaan melakukan penyitaan sejak tahap penyidikan, pemblokiran aset untuk menekan kepatuhan terdakwa, serta koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung guna memperoleh kepastian hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti di wilayah Kejaksaan Negeri Pasaman Barat berjalan dengan pendekatan yang adaptif, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan aset, ketidakmampuan ekonomi terpidana, dan ketidaktepatan administrasi. Meskipun demikian, kejaksaan telah melakukan berbagai upaya optimalisasi. Keberhasilan eksekusi tidak hanya mencerminkan penegakan hukum, tetapi juga kontribusi terhadap pemulihan kerugian negara secara nyata.

Kata kunci: Eksekusi, Pidana, Uang Pengganti, Korupsi, Kejaksaan, Pemulihan Keuangan Negara

CRIMINAL EXECUTION OF COMPENSATION PAYMENTS IN CORRUPTION CASES WITHIN THE JURISDICTION OF THE PASAMAN BARAT DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE

(Ilham Fajar, 2220113002, Postgraduate Program, Faculty of Law, Andalas University,

114 pages, 2025)

ABSTRACT

The execution of criminal sanctions in the form of compensation payments is a strategic instrument for recovering state financial losses caused by acts of corruption. This sanction aims to ensure that perpetrators do not profit from their crimes and that the state is duly compensated. Although a legal framework exists to regulate this mechanism, its implementation within the jurisdiction of the Pasaman Barat District Prosecutor's Office still faces several substantive and administrative challenges that affect its effectiveness. This thesis seeks to address the following research questions: (1) How is the execution of compensation payment sanctions carried out in corruption cases within the jurisdiction of the Pasaman Barat District Prosecutor's Office? (2) What are the obstacles encountered by the Pasaman Barat District Prosecutor's Office in executing these sanctions? and (3) What efforts are being made by the Prosecutor's Office to ensure the execution of compensation payments in corruption cases? Using a sociological legal approach with a descriptive design and qualitative analysis, the results of the study indicate that the execution of criminal payments of compensation has generally been carried out but has not been optimal in accordance with applicable regulations, especially Article 18 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption (as amended by Law No. 20 of 2001), practical barriers remain. These include the limited financial capacity of convicts, the absence of executable assets, and delays in adjusting the legal status of seized property. Such obstacles highlight the gap between judicial decisions and real-world implementation. In response, the prosecution has taken several steps, including asset seizure during investigation, asset blocking to encourage compliance, and coordination with higher prosecutorial authorities to achieve legal certainty. This study concludes that while the execution process in Pasaman Barat demonstrates an adaptive approach, persistent challenges remain. Nevertheless, the efforts undertaken have shown that proper execution not only upholds legal enforcement but also contributes significantly to the recovery of state assets.

Keywords: *Execution, Criminal Sanction, Compensation, Corruption, Prosecutor, State Financial Recovery*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“EKSEKUSI PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT”**. Selanjutnya shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari zaman jahiliah sampai kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang.

Langkah penulis menyelesaikan pendidikan magister dan menyelesaikan penulisan tesis ini tidak terlepas dari peran serta orang-orang terkasih yang hadir dalam kehidupan pribadi penulis. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis papa, H. Herizal dan mama, Dra. Gusnetti atas bimbingan, kasih sayang dan dukungan yang tiada henti sedari penulis lahir hingga dewasa. Kepada saudara-saudaraku, Musyiami Ramadhani, S.H., M.H., Riyan Hidayat, S.H., M.H., Irsal Habibi, S.H., dan adik bungsu tersayang Rani Anggun Mentari, terima kasih atas cinta tulus dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini. Kepada seluruh keluarga besar dari pihak mama dan papa yang selalu mendoakan kesuksesan penulis, terkhusus kepada panutan yang akan penulis hormati sepanjang hayat Bude Dr. Shinta Agustina, S.H., M.H. (Almh), terima kasih atas bimbingan, bantuan dan prinsip yang selalu diajarkan semoga menjadi ladang amal yang tidak pernah putus.

Penulisan tesis ini berlangsung tidak lain karena dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun secara materiil. Oleh sebab itu, sudah pada

tempatny bila dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak tersebut.

Pertama-tama penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum., yang bertindak selaku Pembimbing I, penghargaan yang sama juga diberikan kepada Ibu Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL yang bertindak selaku Pembimbing II, terima kasih atas segala kesabaran, perhatian, kasih sayang, dan dukungan yang telah diberikan selama penyelesaian tesis ini.

Penulisan tesis ini juga menjadi lebih baik setelah penulis mendapatkan masukan dari para penguji. Untuk itu penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. H. Ismansyah S.H.,M.H., Bapak Lucky Raspati, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Yoserwan., S.H.,M.H.,L.LM

Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Bapak Prof. Dr. Ferdi.,S.H.M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Wakil Dekan I, Ibu Nani Mulyati, S.H.,M.H., Wakil Dekan II, Bapak Dr. Hengki Andora, S.H.M.H.,
2. Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ibu Dr. Yasniwati S.H.,M.H., dan Bapak Anton Rosari S.H.,M.H., selaku Sekretaris Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.

3. Seluruh Bapak/Ibu Dosen/Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan dan bekal untuk menjadi seorang magister hukum.
4. Seluruh karyawan/ti selaku tenaga kependidikan yaitu Biro Akademik, Biro Kemahasiswaan, dan Biro Umum Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Seluruh teman-teman Magister Hukum Universitas Andalas angkatan 2022 yang telah berbagi suka dan duka bersama penulis selama mengikuti proses pendidikan, pembelajaran dan pembinaan sebagai seorang mahasiswa.
6. Setiap orang yang telah hadir dalam kehidupan pribadi penulis, membangun pribadi penulis hingga penulis dapat terus berkembang dan berkarya, terima kasih atas segala kasih sayang, suka duka dan maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan selama kita berinteraksi.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, segala yang baik dari tulisan ini datang dari Allah SWT dan yang buruk menjadi tanggung jawab penulis. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, Amin Yaa Rabbal 'Alamin. Untuk perbaikan tesis ini ke depan, penulis mengharapkan kritik dan masukan yang konstruktif.

Padang, Mei 2025
Penulis,

Ilham Fajar

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Manfaat Penelitian.....	20
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	22
F. Keaslian Penelitian.....	36
G. Metode Penelitian.....	38
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	43
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	43
B. Pengaturan dan Pengertian Pidana Pembayaran Uang Pengganti.....	60
C. Pengertian Tentang Eksekusi Dalam Pidana.....	66
D. Pengaturan Mengenai Kerugian Keuangan Negara.....	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Eksekusi Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	73
B. Kendala Dalam Eksekusi Uang Pengganti.....	95
C. Upaya Optimalisasi Eksekusi Pidana Uang Pengganti.....	99
BAB IV PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	